

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENGADAAN AIR BERSIH DI DESA SRIWIJAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG PASCA BANJIR

Rena Arifah¹, Riza Ria Wirasari², Zahrul Ulum³, Risky Fajar Sundari⁴

^{1,2,3}) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Alwashliyah Medan

⁴) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Alwashluiyah Medan
e-mail: renaarifah@gmail.com

Abstrak

Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan sering menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks, sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Desa Sriwijaya merupakan desa yang terkena dampak banjir besar yang terjadi pada bulan November 2025, yang mengakibatkan sumber air bersih di desa tersebut sangat minim sekali. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, evaluasi dan keberlanjutan program terkait kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang pembuatan sumur bor sebagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat desa pasca banjir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat desa mengenai pentingnya air bersih dan pemberian mesin sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang

Kata kunci: Air Bersih, Banjir, Pendampingan Bagi Masyarakat

Abstract

Natural disasters are unavoidable phenomena and often have significant impacts on the social, economic, and environmental well-being of communities. As an archipelagic nation with complex geography, Indonesia is highly vulnerable to hydrometeorological disasters such as floods, landslides, and extreme weather. Sriwijaya Village was impacted by the massive floods that occurred in November 2025, resulting in a critical shortage of clean water sources. Implementation methods included outreach, training, technology application, mentoring, evaluation, and program sustainability related to outreach activities, training, and mentoring on drilling wells, a basic need for the village community after the flood. Community service activities increased the village community's insight and knowledge about the importance of clean water and provided well-drilling machines to meet their clean water needs. Sriwijaya Village, Aceh Tamiang Regency.

Keywords: Clean Water, Flood, Community Assistance

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan sering menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks, sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem (Varwati, 2025). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 3.176 bencana alam di Indonesia, dengan banjir dan longsor mendominasi hingga 99,02% dari total kejadian (Zintan Prihatini, 2025). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa kejadian bencana di Indonesia terjadi hampir setiap tahun dan berdampak langsung pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif, khususnya pada saat terjadi bencana alam (Suhartadi, 2025).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pemulihan dan penyaluran bantuan pasca bencana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana harus dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel guna menjamin hak-hak masyarakat terdampak (Pristiyanto, 2025). Hal ini juga diperjelas Hung bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya (Sukamto, 2023). Kondisi pemulihan pascabencana di wilayah ini menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan

akses jalan, listrik, dan air bersih. Penyaluran bantuan menjadi aspek krusial dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak (Suparto, 2025).

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang rentan mengalami bencana banjir, sehingga penyaluran bantuan pasca bencana menjadi aspek krusial dalam proses pemulihan masyarakat (Pristiyanto, 2025). Bantuan yang disalurkan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan stabilitas sosial serta mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat (Suparto, 2025). Penyaluran bantuan pascabencana perlu dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya (Sukanto, 2023).

Namun, dalam praktiknya, penyaluran bantuan sering menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi bantuan, dan kurangnya transparansi informasi (Suparto, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan pasca bencana disalurkan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan korban (Varwati, 2025). Keterlibatan masyarakat ini sejalan dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan pasca bencana (Sukanto, 2023).

Dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran pengawasan masyarakat terhadap bencana pada Aceh Tamiang sangat penting (Alfarisi, 2025). Hal ini juga ditegaskan oleh Sutopo Purwo Nugroho bahwa pengawasan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus kebijakan, yang berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam distribusi bantuan dan kegiatan rehabilitasi pascabencana (Nugroho, 2019). Pengawasan masyarakat dalam penanganan pascabencana merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas kebijakan publik dan kualitas pelayanan pemulihan (Darmawan, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait peran pengawasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang antara lain masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai jenis, jumlah, dan mekanisme distribusi bantuan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara optimal (Varwati, 2025). Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penyaluran bantuan berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran serta ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan riil korban bencana (Zintan Prihatini, 2025). Permasalahan lainnya adalah lemahnya saluran pengaduan dan tindak lanjut atas laporan masyarakat, yang mengakibatkan pengawasan publik belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap keterlambatan distribusi, potensi penyimpangan, dan kurangnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan pascabencana (Suparto, 2025).

Beberapa penelitian tentang peran pengawasan masyarakat terhadap pascabencana telah banyak dibahas, adapun beberapa penelitian menyatakan bahwa pengawasan masyarakat merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik (Dwiyanto, 2018). Dalam konteks pascabencana, pengawasan oleh masyarakat terdampak sangat dibutuhkan karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan riil di lapangan (Suparto, 2025). Tanpa pengawasan masyarakat, pelayanan publik pascabencana berisiko tidak tepat sasaran dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban bencana (Zintan Prihatini, 2025).

Lebih lanjut memandang pengawasan masyarakat sebagai bagian dari praktik demokrasi administrasi, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengawasi kinerja birokrasi (Thoha, 2003). Dalam konteks pascabencana, pengawasan ini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi serta memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah di mata publik (Darmawan, 2025). Pandangan ini diperkuat oleh Prasjo dan Holidin yang menekankan bahwa pengawasan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip good governance, khususnya dalam menjamin transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas koordinasi antar lembaga pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (Prasjo & Holidin, 2018).

Dalam perspektif kebencanaan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan pascabencana sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, termasuk dalam fungsi pengawasan (Nugroho, 2019). Pengawasan masyarakat berperan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, keberlanjutan, serta pengurangan risiko bencana di masa mendatang (Alfarisi, 2025).

Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi dalam pengawasan masyarakat dalam penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada proses penyaluran bantuan serta memastikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Pengawasan masyarakat turut mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus meningkatkan responsivitas aparatur dalam memberikan pelayanan pascabencana (Darmawan, 2025). Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola penanganan pascabencana agar proses pemulihan dapat berlangsung secara adil, efektif, dan berkelanjutan (Suparto, 2025).

METODE

Metode intervensi sosial adalah salah satu metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi untuk membantu orang perorangan atau kelompok atau keluarga atau komunitas dalam konteks kehidupan sosial mereka dengan tujuan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Metode intervensi sosial ini kami lakukan dengan tujuan untuk dapat memperbaiki fungsi sosial masyarakat. Menurut Jukman Iskandar, kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah dicapai ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik. Maka dari itu kami menggunakan metode intervensi sosial dalam kegiatan PKM ini dengan tujuan mengatasi masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan PKM, kami menggunakan pendekatan pemecahan masalah (problem solving approach), dimana kami menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang terutama masalah air bersih pasca banjir bandang.

Metode ini meliputi beberapa tahapan. Menurut J. Dewey dalam metode problem solving meliputi beberapa tahapan yakni merumuskan masalah, menelaah masalah, mengumpulkan dan mengelompokkan data, menentukan penyelesaian masalah. Dengan melakukan metode ini diharapkan masalah yang ada di desa Sriwijaya ini bisa terselesaikan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilokasi mitra dijadwalkan selama dua hari. Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan kemitraan masyarakat ini masih berjalan. Berikut ini deskripsi pelaksanaan program PKM untuk masing-masing kegiatan:

1. Sosialisasi dan pendampingan mengenai air bersih dalam penanganan pasca banjir

Pelaksanaan : 03 Januari 2026

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dua tahap yaitu pertama di rumah Kepala desa Sriwijaya Aceh Tamiang, pukul 09.00 WIB sampai selesai. Pada kegiatan awal ini diisi dengan narasumber menyampaikan materi terkait sosialisasi peran air bersih bagi kehidupan manusia. Kegiatan tahap kedua dilakukan yaitu pendampingan dan praktek pembuatan sumur bor. Pada demonstrasi ini diimplementasikan pembuatan sumur bor bagi masyarakat desa Sriwijaya kabupaten Aceh Tamiang.

b. Manfaat

Kegiatan ini dapat memberikan informasi mengenai penggunaan air bersih bagi warga desa Sriwijaya

c. Kendala

Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pelatihan ini. Rapat, pelatihan dan praktik berjalan lancar dan sesuai dengan rencana



Gambar 1. Sosialisasi mengenai pembuatan sumur bor

2. Penyerahan Bantuan Sumur Bor Bagi Masyarakat Desa Sriwijaya

Pelaksanaan : 04 Januari 2026

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyerahan bantuan sumur Bor dilakukan langsung oleh ketua tim pelaksana dan juga pendiri rumah Briket yaitu Ir. Rena Arifah, M.Si kepada kepala desa Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang. Manfaat Pemberian mesin ini membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih pasca banjir yang terjadi di Bulan November 2025, sehingga masyarakat mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari

b. Kendala

Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pelatihan ini. Rapat, pelatihan dan praktik berjalan lancar dan sesuai dengan rencana berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.



Gambar 2. Penyerahan Sumur Bor bagi Masyarakat Desa Sriwijaya Kab. Aceh Tamiang

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran para dosen Fakultas teknik Universitas Alwashliyah Medan dan Rumah Briket dalam membantu pemulihan kebutuhan dasar warga desa Sriwijaya Pasca Banjir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rumah Briket dan Universitas Alwashliyah Medan, sehingga terlaksana nya kegiatan pengabdian ini yang dapat bermanfaat bagi warga desa Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang pasca Banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, B. (2025). 11 Daerah Masih Berstatus Tanggap Darurat Usai Bencana Banjir Sumatera. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/05/05263381/11-daerah-masih-berstatus-tanggap-darurat-usai-bencana-banjir-sumatera>

- Darmawan, R. K. (2025). Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Indonesia pada 9 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-indonesia-pada-9-desember-2025>
- Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi. UGM press.
- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press.
- Gurria. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance.
- Kinanthi, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan. 6, 22–28.
- Kurniawati, C. P. (2015). Kajian Permasalahan Kebijakan Penetapan Status Bencana, Kelembagaan BPBD, dan Pengelolaan Bantuan Pasca Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007. Alamat Redaksi, 1(1), 107–127.
- Makhfud. (2024). Community Participation in Flood Disaster Management. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(4), 10–21070.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 14(1), 71–84.
- Nugroho, S. P. (2019). Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana.
- Prasojo, E., & Holidin, D. (2018). Leadership and public sector reform in Indonesia. In Leadership and Public Sector Reform in Asia (Vol. 30, pp. 53–83). Emerald Publishing Limited.
- Pristiyanto, D. (2025). Perka BNPB No. 11/2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana>
- Raihan, G., Fadhillatunisa, Fawwaz, U., Nuzulla, F., & Mutiara, D. (2024). Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education, Volume 6, No. 1, June 2024 E ISSN. 6(1), 25–34.
- Suhartadi, I. (2025). Aceh Tamiang Masih Jadi Fokus Penyaluran Bantuan. Investor.Id. <https://investor.id/national/422905/aceh-tamiang-masih-jadi-fokus-penyaluran-bantuan>
- Sukanto, E. (2023). Mengenal Manajemen Bencana. MNJ (Mahakam Nursing Journal). 3(1), 34–42.
- Suparto. (2025). Dukung Percepatan Pemulihan Pascabencana, PLN Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak di Aceh Tamiang. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/energi-untuk-rakyat/7768580/dukung-percepatan-pemulihan-pascabencana-pln-salurkan-bantuan-ke-warga-terdampak-di-aceh-tamiang>
- Suranto, J., & Pramono, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Management Bencana. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 6(1), 80–89.
- Varwati, L. (2025). BLTS Rp 900 Ribu di Aceh Tamiang Disalurkan Manual, Kantor Pos Masih Rusak Pascabencana. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2025/12/31/155046/blts-rp-900-ribu-di-aceh-tamiang-disalurkan-manual-kantor-pos-masih-rusak-pascabencana>